

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui perencanaan yang baik, diharapkan tujuan pembangunan yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Mamuju melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Rancangan Renja OPD dibahas pada forum OPD, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Mamuju dan Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan dengan Keputusan Kelapa OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2023 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RPJMD.RKPD tersebut untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah diharuskan menyusun Renja OPD Dinas Sosial Kabupaten Mamuju guna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra OPD Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah kabupaten Mamuju dibidang Sosial mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial; serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah. Dengan demikian sangatlah tepat pemerintah Kabupaten Mamuju dalam memantapkan programnya tentang kebijakan teknis dibidang Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Renja Dinas Sosial tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Dinas sosial 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Substansi dan muatan Renja OPD, meliputi : (1). Program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, (2). Lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/Kel. atau kecamatan, (3). Indikator Kinerja yang terdiri dari kinerja Program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja Kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. (4). Kelompok Sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat yang rentan termarginalkan (5). Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja OPD disusun melalui tahapan sebagai berikut ; (1) Persiapan penyusunan Renja OPD, (2) Penyusunan rancangan Renja OPD, (3) Pelaksanaan forum OPD dan (4). Penetapan Renja OPD. Renja Dinas Sosial Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2021 - 2061 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, Renstra OPD Dinas Sosial agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju nomor 72 tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial dipimpin oleh Kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan Dokumen Tugas, Fungsi dan Struktur OPD;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Kinerja Pelayanan OPD;
- c. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD;
- d. Pengoordinasian Perencanaan DPRD;
- e. Pengoordinasian Perencanaan antar Perangkat Daerah;
- f. Pengoordinasian Kerjasama Antar Daerah;
- g. Pengendalian dan Evaluasi perencanaan daerah;
- h. Melaksanakan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan pada bidang Sosial;
- i. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(Ulasan singkat tentang OPD)

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja *Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2019*:

1. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);*
2. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);*
3. *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);*
4. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);*
5. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);*
6. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
7. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);*
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);*
9. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2008;*
10. *Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;*

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 75); (30 des 2016)
16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Berita Daerah Tahun 2016, Nomor 578);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial tahun 2024 adalah untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 terutama yang terkait dengan urusan Sosial, yakni sebagai instrumen untuk mengembangkan pelayanan yang baik,cepat,tepat dan punya kepastian hukum.

Tujuannya penyusunan Renja Dinas sosial adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD 2024 dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial kabupaten Mamuju Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I merupakan Bab Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Renja Dinas Sosial Tahun 2024.

Bab II merupakan Bab Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu yang berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III merupakan penjelasan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahan terhadap kebijakan provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari Penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN TERHADAP RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses pelayanan yang dilaksanakan oleh OPD, dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pelayanan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan ditahun-tahun mendatang.

Kondisi Daerah Kabupaten Mamuju terkait dengan urusan perencanaan di bidang sosial salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja adalah ketersediaan dokumen perencanaan. Ini sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan Dinas Sosial diantaranya: Dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD tahunan, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Kabupaten Mamuju ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai, dan belanja langsung diperuntukkan untuk belanja OPD dan Belanja Publik dengan ruang lingkup kegiatannya.

Sesuai dengan target capaian program dan kegiatan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Mamuju 2021 – 2026, terkait dengan urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdapat beberapa sasaran program yang tentunya akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sebagai bentuk komitmennya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Mamuju yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Anggaran Belanja Tidak langsung Pada Dinas Sosial Sebesar Rp. 2,296,421,810 dan Realisasi sebesar Rp. 2,258,658,922 atau 98,36% sedangkan Belanja langsung Pada Dinas Sosial Sebesar Rp. 3,520,626,400 dan Realisasi Sebesar

Rp.2,693,600,439 atau 76,50%%. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga tidak mencapai 100% dalam realisasi sebagai Berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 1,214,277,480 realisasi Rp. 410,872,480 / 33,84% tidak terealisasi secara keseluruhan karena anggaran keluar bulan Desember sehingga kegiatan dilaksanakan di tahun 2023.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 1,562,591,600 realisasi Rp. 1,504,061,600 / 96,25% tidak terealisasi 100% karena pada sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada saat penyaluran BLT Inflasi ada masyarakat yang tidak mengambil bantuannya sehingga dikembalikan.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dianggarkan sebesar Rp. 4.991,600 dan tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya data/ laporan korban yang diterima

Tc.29

KO DE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/Kegiatan (out put)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD tahun 2022			Target Progra m/Kegi atan Renja OPD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
				Urusan Penunjang Pemerintahan Umum											
				1. Urusan Sosial											
0 1				Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
0 1	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	60	Dokumen	12	12	12	100%	10	34	57%	
0 1	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	2	3	3	100%	2	7	70%	

01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%	
01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%	
01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%	
01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%	
01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	laporan	2	4	4	100%	2	8	80%	
01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	laporan	4	4	4	100%	0	8	40%	
		0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan adm. Keuangan	130	Dokumen	26	24	24	100%	26	76	58%	
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang	29	29	29	100%	30	30	91%	

01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130	Dokumen	26	29	29	100%	30	85	65%	
01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60	Dokumen	12	12	12	100%	12	36	60%	
01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	laporan	12	12	12	100%	12	36	60%	
01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah OPD	1	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	300%	
01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah OPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%	
01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%	
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	10	10	10	100%	7	27	540%	
01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	2	33	33	100%	2	2	20%	
01	2	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	paket	1	10	10	100%	8	19	380%	

01	2	06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	paket	1	3	3	100%	1	5	100%	
01	2	06	05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5	laporan	1	195	195	100%	11	207	4140%	
01	2	06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	205	laporan	41	25	25	100%	42	108	53%	
01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	20	unit	4	6	6	100%	6	16	80%	
01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	unit	1	1	0	0%	2	3	60%	
01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	1	1	0	0%	3	4	20%	
01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20	unit	4	7	7	100%	0	11	55%	
01	2	08	02	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	20	laporan	4	4	4	100%	4	12	60%	
01	2	08	04	Penyedia Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	laporan	3	3	3	100%	3	9	60%	
01	2	08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	laporan	4	4	4	100%	4	12	60%	

01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang miik daerah yang terpelihara	100	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%	
01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	unit	3	3	3	100%	3	3	20%	
01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	1	1	1	100%	1	1	20%	
01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	3	3	3	100%	3	9	60%	
01	0	00	00	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS perorangan,keluarga dan kelembagaan yang aktif	75%	Persen	50%	50%	50%	100%	50%	2	200%	
02	2	03	00	Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSKS masyarakat,lembaga,perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PPKS	1811	Orang	342	100	100	100%	100	542	30%	
02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	11	11	11	100%	11	33	66%	

020303	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	101294	keluarga	25316	25316	25316	100%	25316	75948	75%	
020304	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	294	lembaga	182	28	28	100%	28	238	81%	
020000	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	Persen	50	50	47	94%	46	143	143%	
0420100	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau	1200	Orang	230	230	230	100%	230	690	58%	
0420101	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	60	Orang	10	15	15	100%	205	15	25%	
0420200	Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	30		6	6	6	100%	6	18	60%	
0420203	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang menerima	920	Orang	150	75	75	100%	205	430	47%	

					paket permakanan sesuai standar gizi									
04	2	02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	6	0	6	#DIV/0!	1	13	65%
04	2	02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	6	0	6	#DIV/0!	1	13	65%
04	0	00	00	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	5249	Persen	1846	1846	1846	100%	1846	5538	106%
05	2	02	00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	620	keluarga	93	102	102	100%	102	297	48%
05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	24019	keluarga	24019	9077	9077	100%	120212	153308	638%
05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9077	keluarga	1816	3033	3033	100%	9013	13862	153%

05	00	00	00	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100	Persen	20	20	20	100%	20	60	60%	
06	2	01	00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan so	500	Orang	100	100	100	100%	100	300	60%	
06	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Orang	100	100	100	100%	100	300	60%	
06	2	2	00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	112	Orang	28	28	28	100%	28	84	75%	
06	2	2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	112	Orang	28	28	28	100%	28	84	60%	
106	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100	Persen	100	100	100	100%	100	300	60%	
106	03	201		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	36	Orang	5	5	0	0%	0	5	60%	

				Desa/Kelurahan Asal										
1	0	20	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	36	Orang	5	5	0	0%	0	5	60%
0	0	00	00	Program Pngelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	100	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
0	2	01	00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	5	Makam	1	1	1	100%	1	3	60%
0	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	5	Makam	1	1	1	100%	1	3	60%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional yang dikenal dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem musrenbang sudah dikembangkan lebih baik, dalam pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal (*tabel Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir/matriks kinerja/renja*)

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Mamuju selaku Dinas Sosial mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar Daerah dan Pusat.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, baik antar daerah antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

MATRIKS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kab. Mamuju

No	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023			2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	thn (n-2)	thn (n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17
	Persentase PMKS yang mandiri	, -		20%	20%	42%	50%	0%	0%	42%	50%	
	Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial	-		60	75	100	100	109	121	100	100	

	Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	-		79,23%	78,34%	77,56%	76,86%	100%	100%	77,56%	76,86%	
	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase PSKS perorangan, keluarga dan kelembagaan yang aktif			50%	58%	67%	75%	54%	56%	67%	75%	
	Persentase Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	-		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	

	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-		58,46%	56,69%	55,12%	53,73%	96,35%	62,67%	58,46%	56,69%	
	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Nilai Akip OPd	-		C	CC	B	B	B	B	B	B	
	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%		100	100	100	100	14	21	16	24	
	Rehabilitasi sosial Anak terlantar diluar panti	100%		3	3							
	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%										

	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%										
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten kota	100%										

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu merumuskan Arah kebijakan, dan langkah operasional pelayanan Kesejahteraan Sosial teknis perencanaan di bidang sosial menghadapi beberapa kendala diantaranya :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran Penyelenggaraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur secara kualitas dan kuantitas dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
3. Kurangnya sumber daya manusia dibidang Sosial, factor yang mempengaruhi adalah pola karier kepegawaian yang tidak menerapkan prinsip kesinambungan jabatan, kurangnya pelatihan, bimbingan teknis dibidang Sosial.
4. Kurangnya kesadaran tentang arti penting perencanaan di bidang sosial, faktor yang mempengaruhi adalah paradigma pelayanan yang belum berubah sejak ekonomi daerah, sementara peraturan yang berhubungan dengan perencanaan pelayanan telah disesuaikan dengan era otonomi daerah.
5. Konsistensi terhadap perencanaan pembangunan masih rendah, factor yang berpengaruh adalah tidak adanya kesadaran masyarakat akan pemerataan pembangunan sehingga perencanaan yang sudah disusun terkendala oleh kehendak masyarakat serta kekuatan politik yang terkadang menyimpang dari perencanaan.
6. Kurangnya pengetahuan OPD terhadap proses dan mekanisme perencanaan pembangunan, factor yang mempengaruhi adalah tidak adanya perencanaan di OPD yang secara fungsional menangani perencanaan sehingga seringkali berubah.
7. Belum maksimalnya tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa ketersediaan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, KUA/PPAS dan RKA dan penyusunan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah berupa LKPJ tahunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD *(tabel Matriks Review Ranwal RKPD Terlampir)*

TABEL TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kab. Mamuju	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.165.899.918	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	kab. Mamuju	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah			
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	12 dok	68.601.098	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	#VALUE!	26.670.529	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	5.040.182	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	Rp 4.465.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	8.668.440	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	Rp 3.465.200	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.965.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dok	Rp 2.965.200	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.572.218	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Rp 1.193.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.354.418	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Rp 1.193.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 laporan	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 laporan	Rp 10.747.200	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	0	Evaluasi kinerja perangkat daerah	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	Rp 2.641.329	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Jumlah dok/laporan adm. Keuangan	26 org	2.508.281.804	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Jumlah dok/laporan adm. Keuangan	#VALUE!	2.502.394.377	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 org	2.493.534.764	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 org	#####	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	924.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	Rp 1.034.800	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 lap	6.911.520	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 lap	Rp 20.395.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 lap	6.911.520	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 lap	Rp 5.712.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Mamuju	cakupan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	0	paket	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Mamuju	cakupan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	50 paket	20.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	kab. Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	kab. Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 paket	Rp 20.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah OPD	1 kali	5.314.320	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah OPD	1 dok	4.032.000	

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	5.314.320	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	Rp 4.032.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	254.350.296	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Mamuju	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	#VALUE!	133.208.952	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	47.981.674	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	Rp 2.071.701	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.575.510	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 10.045.875	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	5.728.140	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	Rp 6.108.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab. Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	2.758.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab. Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Rp 2.440.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	22.832.700	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 lap	Rp 12.480.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	160.473.472	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	Rp 100.063.376	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Mamuju	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	4 jenis	80.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Mamuju	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	#VALUE!	43.496.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	40.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	kab. Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Rp 32.196.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kab. Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 jenis	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kab. Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 jenis	Rp 11.300.000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Mamuju	Jumlah jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	4 org	173.078.400	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Mamuju	Jumlah jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	#VALUE!	116.997.408	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	86.539.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	Rp 28.762.704	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 lap	86.539.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	Rp 88.234.704	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Mamuju	Persentase barang miik daerah yang terpelihara	7 jenis	76.274.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Mamuju	Persentase barang miik daerah yang terpelihara	#VALUE!	124.480.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	33.608.960	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	Rp 34.367.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	32.118.240	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Rp 31.199.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kab. Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	10.546.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kab. Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	Rp 58.914.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase PSKS perorangan,keluarga dan kelembagaan yang aktif	50%		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase PSKS perorangan,keluarga dan kelembagaan yang aktif			

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah PSKS masyarakat, lembaga, pe- rorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PPKS	100 Org	#REF!	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah PSKS masyarakat, lembaga, pe- rorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PPKS	#VALUE!	59.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 org	36.301.210	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 org	Rp 29.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				kab. Mamuju	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 org	Rp 9.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25316 kelurga	132.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8.025 keluarga	Rp 21.000.000	

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial				kab. Mamuju	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	2 klp	20.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial				kab. Mamuju	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	2 klp	20.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	kab. Mamuju	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				kab. Mamuju	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2 klp	Rp 20.000.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	206.345.498	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		115.991.000	

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	kab. Mamuju	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau	230 org	36.850.550	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	kab. Mamuju	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau	#VALUE!	79.035.400		
	Penyediaan Permakanan	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 org	0 org	50 org	Penyediaan Permakanan	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 org	Rp 38.779.000	
	Penyediaan Sandang	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 org	Rp 21.990.000		

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	7 org	Rp 12.769.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 org	Rp 5.497.400	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	kab. Mamuju	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	6 Org	169.494.948	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	kab. Mamuju	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	6 org	36.955.600	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 org	Rp 36.955.600	

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	58,56%	192.500.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	145.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	102 KPM	192.500.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	139560	145.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	24.019 keluarga		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	130.000	Rp 45.000.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	kab. Mamuju	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.013 kpm	165.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	kab. Mamuju	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.560	Rp 100.000.000

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	kab. Mamuju	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100%		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	kab. Mamuju	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	#VALUE!	396.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	100 kk		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	160 kk	60.000.000	
	Penyediaan Permakanan	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 kk	308.000.000	Penyediaan Permakanan	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	160 kk	Rp 60.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	28 org	27.500.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	28 org	336.000.000	

	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 org	27.500.000	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 org	Rp 336.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	kab. Mamuju	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	100%	10.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	kab. Mamuju	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	1 tmp	10.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	kab. Mamuju	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP	10.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	kab. Mamuju	Jumlah TMP yang terpelihara	1 tmp	10.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 TMP	10.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 tmp	Rp 10.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	kab. Mamuju	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	100%	7.158.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	kab. Mamuju	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	100%	7.158.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	kab. Mamuju	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP	7.158.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	kab. Mamuju	Jumlah TMP yang terpelihara	2 TMP	20.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP	7.158.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah TMP yang terpelihara	2 TMP	20.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 Merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun ini disusun dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra, dan RKPD Kabupaten Mamuju, namun tetap memperhatikan usulan program dari berbagai pihak baik dari usulan masyarakat (Musrenbang) maupun dari pemangku kepentingan, LSM bila ada. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan melayani dan memahami kebutuhan masyarakat. Disisi lain Dinas Sosial selalu siap dan sanggup untuk membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat *(Dinas Sosial ada usulan Musrenbang ke Provinsi)*

Tabel 4 (T-C.32.)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU

OPD : DINAS SOSIAL

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	25 klp	Pokir
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	25 klp	Pokir
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	kab. Mamuju	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	25 klp	Pokir

2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	kab. Mamuju	Persentase PSKS perorangan, keluarga dan kelembagaan yang aktif	101 org	Pokir
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah PSKS masyarakat, lembaga, perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PPKS	101 org	Pokir
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kab. Mamuju	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	101 org	Pokir

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renstra-KL dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Program dalam RPJMN ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagai institusi perencana pembangunan di daerah, Dinas Sosial turut mendukung prioritas pembangunan nasional tersebut dengan mengkoordinasikannya dengan OPD teknis agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan Dinas Sosial ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Sulbar dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program dalam RPJMD ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Arah kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi Barat sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2012-2017, meliputi : Tata kelola pemerintahan dan profesionalisme aparatur, pengentasan kemiskinan, sarana dan prasarana ekonomi vital daerah, meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan berkualitas, kualitas dan derajat kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi vital daerah dan Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Program kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat serta pencapaian target dan sasaran Agenda Prioritas Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2012-2017. Usulan

program kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas SKPD, maupun lintas Kabupaten. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Provinsi ke dalam satu tujuan yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Sosial.
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Sosial.
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

(Tabel Tujuan dan Sasaran)

3.4 Program dan Kegiatan

Berdasarkan pada Renstra, program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

5. Program Penanganan Bencana

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota

3.5 RUMUSAN
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN
2024

4.1 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN
2025

OPD :DINAS
SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X X	00 0 00 00	SEMUA URUSAN							

X	X	01	0	00	00	SEMUA BIDANG URUSAN				Rp 3.598.241.329				
X	X	01	2	01	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Mamuju	100%	Rp 2.852.250.329	APBD		100%	3.137.475.361,90
X	XX	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kab. Mamuju	12 dok	Rp 24.029.200	APBD		12 Dokumen	26.432.120
X	XX	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	2 dok	Rp 4.465.200	APBD		2 Dokumen	4.911.720
X	XX	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju	1 dok	Rp 3.465.200	APBD		1 Dokumen	3.811.720
X	XX	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kab. Mamuju	2 dok	Rp 2.965.200	APBD		1 Dokumen	3.261.720

								RKA-SKPD							
X	XX	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 dok	Rp	1.193.200	APBD		1 Dokumen	1.312.520
X	XX	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 dok	Rp	1.193.200	APBD		1 Dokumen	1.312.520
X	XX	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Mamuju	4 laporan	Rp	10.747.200	APBD		2 Dokumen	11.821.920
X	XX	01	2	02	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	4 dok	Rp	2.641.329	APBD		4 Dokumen	2.905.462
X	XX	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan adm. Keuangan	Kab. Mamuju	32 org	Rp	2.502.394.377	APBD		30 Orang	2.752.633.815

X	XX	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju	32 org	Rp 2.475.251.977	APBD		30 Orang	2.722.777.175
X	XX	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mamuju	1 dok	Rp 1.034.800	APBD		30 Orang	1.138.280
X	XX	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	12 lap	Rp 20.395.600	APBD		12 Orang	22.435.160
X	X X	01	2	02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Mamuju	12 lap	Rp 5.712.000	APBD		12 Orang	6.283.200
X	XX	01	#			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Mamuju	50 paket	Rp 20.000.000	APBD		52 paket	22.000.000
X	XX	01	#	02	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mamuju	50 paket	Rp 20.000.000	APBD		52 paket	22.000.000

X	XX	01	2	02	05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah OPD	Kab. Mamuju	1 kali	Rp	4.032.000	APBD		1 Unit	4.435.200
X	X X	01	2	02	06	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mamuju	1 dok	Rp	4.032.000	APBD		1 Unit	4.435.200
X	XX	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Mamuju	100%	Rp	133.817.952	APBD		100%	147.199.747
X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	3 jenis	Rp	2.071.701	APBD		1 Unit	2.278.871
X	XX	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	1 paket	Rp	10.045.875	APBD		2 Unit	11.050.463
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	10 paket	Rp	6.108.000	APBD		1 Unit	6.718.800

X	XX	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju	3 paket	Rp 2.440.000	APBD		1	2.684.000
X	XX	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju	11 lap	Rp 13.089.000	APBD		1	14.397.900
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	12 lap	Rp 100.063.376	APBD		41	110.069.714
X	X X	01	2	07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Mamuju	4 jenis	Rp 43.496.000	APBD		4	47.845.600
X	XX	01	2	07	07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Mamuju	1 unit	Rp 32.196.000	APBD		1	35.415.600
X	X X	01	2	08	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju	5 Unit	Rp 11.300.000	APBD		4	12.430.000

X	XX	01	2	08	02	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kab. Mamuju	12 laporan	Rp 116.997.408	APBD		4	128.697.149
X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 laporan	Rp 28.762.704	APBD		3	31.638.974
X	X	01	2	09	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 laporan	Rp 88.234.704	APBD		4	97.058.174
X	XX	01	2	09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang miik daerah yang terpelihara	Kab. Mamuju	7 unit	Rp 124.480.800	APBD		7 unit	136.928.880
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju	3 unit	Rp 34.367.600	APBD		3	37.804.360

X	XX	01	2	09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mamuju	1 unit	Rp	31.199.200	APBD		1	34.319.120
X	XX	01	#	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju	3 unit	Rp	58.914.000	APBD		3	64.805.400
1	1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS perorangan, keluarga dan kelembagaan yang aktif	Kab. Mamuju		Rp	59.000.000	APBD		75	64.900.000
1	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS masyarakat, lembaga, perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PPKS	Kab. Mamuju		Rp	59.000.000	APBD		423	64.900.000

1	1	06	02	2.0 3	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	11 org	Rp	29.000.000	APBD		12	31.900.000
1	1	6	2	##	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	5 org	Rp	9.000.000	APBD		6 org	9.900.000
1	1	06	02	2.0 3	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	8.025 keluarga	Rp	21.000.000	APBD		25316	23.100.000
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Kab. Mamuju	2 klp	Rp	20.000.000	APBD			22.000.000

1	06	05	#			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	Kab. Mamuju	2 klp	Rp 20.000.000	APBD			22.000.000
1	06	05	#	04		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Mamuju	2 klp	Rp 20.000.000	APBD		4 klp	22.000.000
1	1	06	03			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Kab. Mamuju	100%	Rp 115.991.000	APBD		100%	127.590.100

1	1	06	03	2.0	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau	Kab. Mamuju	77 org	Rp 79.035.400	APBD		280	86.938.940
	1	06	03	2.0	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	30 org	Rp 38.779.000	APBD		35 org	42.656.900
	1	06	04	201	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	30 org	Rp 21.990.000	APBD		35 org	24.189.000
	1	06	04	201	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	7 org	Rp 12.769.000	APBD		10 org	14.045.900

	1	06	04	201	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	10 org	Rp	5.497.400	APBD		12 Orang	6.047.140
1	1	6	4			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	Kab. Mamuju	6 org	Rp	36.955.600	APBD		7	40.651.160
	1	06	04	202	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	6 org	Rp	36.955.600	APBD		7 org	40.651.160
1	1	6	4	2		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Kab. Mamuju	56,69%	Rp	145.000.000	APBD		55,12%	159.500.000

1	1	6	4	2	13	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	Kab. Mamuju		Rp 145.000.000	APBD		135 KPM	159.500.000
1	1	06	05			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	130000	Rp 45.000.000	APBD		24019	49.500.000
1	1	06	05	2.0	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	9560	Rp 100.000.000	APBD		9077	110.000.000
1	1	06	05	2.0	01	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Kab. Mamuju	100%	Rp 396.000.000	APBD		100%	435.600.000
1	1	06	05	2.0	02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Kab. Mamuju	160 kk	Rp 60.000.000	APBD		100 kk	66.000.000

1	1	6	6			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	160 kk	Rp 60.000.000	APBD		100 kk	66.000.000
1	1	06	06	2.0	1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Kab. Mamuju		Rp 336.000.000	APBD		10	369.600.000
1	1	6	6	2	1	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	28 org	Rp 336.000.000	APBD		52 Org	369.600.000
1	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Kab. Mamuju	100%	Rp 10.000.000	APBD		100%	11.000.000

1	1	06	07	2.0	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	Kab. Mamuju	1 tmp	Rp 10.000.000	APBD		2	11.000.000
1	1	06	07	2.0	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	1 tmp	Rp 10.000.000	APBD		2	11.000.000

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Sosial ini diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas sosial dan di dalam pelaksanaannya akan senantiasa dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Dinas Sosial, bersama Dinas Sosial terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Anggaran dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai saran untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kabuapten Mamuju. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

